

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika dalam perkembangan hubungan internasional kini tidak hanya terbatas pada aktor negara tetapi juga turut mendorong kemunculan berbagai aktor non-negara. Kompleksitas ini telah mendorong berbagai aktor hadir dalam kerja sama Internasional, aktor-aktor tersebut mencakup perusahaan multinasional, organisasi internasional, hingga aktor lokal. Rumitnya isu dalam hubungan internasional membuka ruang bagi aktor lokal untuk turut berkontribusi dalam aktivitas luar negeri, kehadiran aktor lokal atau *sub-state actor* ini merupakan pengaruh dari diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah oleh negara yang bertujuan memberi ruang bagi daerah untuk berperan aktif dalam hubungan luar negeri serta mendorong pembangunan daerah secara lebih mandiri dan berkelanjutan.¹

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, keterlibatan pemerintah daerah dalam kerja sama luar negeri diatur melalui kerangka regulasi yang berkembang melalui berbagai tahapan dan revisi kebijakan. Regulasi terbaru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 yang mengklasifikasikan kerja sama daerah ke dalam dua bentuk, yaitu Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan

¹ Nablia Safitri, Sisilia Putri Syafira, and Dyah Estu Kurniawati, "Analisa Faktor Penyebab Kegagalan Sister Cities Di Indonesia," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 56–68, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i1.2016>.

Pihak Luar Negeri (KSDPL).² Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama internasional.³ Adapun aspek pendanaan dalam pelaksanaan kerja sama internasional pemerintah daerah juga telah diatur secara tersendiri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011⁴, yang mana kerangka regulasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam kerja sama luar negeri tidak hanya disertai dengan pemberian kewenangan, tetapi juga dibatasi dan diarahkan melalui ketentuan yang mengikat.

Serangkaian revisi regulasi yang telah dilalui oleh pemerintah daerah, mencerminkan keseriusan negara dalam merespons berbagai tantangan pembangunan daerah dan menegaskan arah desentralisasi, dengan berbagai penyesuaian kebijakan. Indonesia terus melangkah di jalur desentralisasi sebagai upaya memperkuat peran daerah tidak hanya dalam pembangunan nasional, tetapi juga dalam menjalin hubungan luar negeri secara langsung melalui berbagai bentuk kerjasama subnasional.⁵ Salah satu bentuk hubungan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah daerah adalah kerjasama

² Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018.

³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Lain*, 2020.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011.

⁵ Suriadi, Padang, and Frinaldi, "Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia."

sister city.⁶ Kota Bandung menjadi salah satu contoh bagaimana kerja sama internasional dapat berkembang dengan baik, khususnya melalui hubungan *sister city* yang dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan daerah dan memperluas pengaruh di tingkat global. Kerja sama *Sister City* di Kota Bandung pertama kali dimulai pada tahun 1960 dengan terjalinnya hubungan kemitraan bersama Kota Braunschweig, Jerman.⁷ Hubungan ini merupakan salah satu kerjasama kota kembar tertua di Indonesia dan telah menjadi pelopor bagi pembentukan *sister city* lainnya, bidang kerjasamanya pun beragam mulai dari sosial budaya, pendidikan, pertukaran pemuda, pelatihan, hingga ekonomi dan pariwisata.⁸ Keberhasilan kerjasama awal dengan Kota Braunschweig, Jerman memberikan dorongan positif bagi Kota Bandung untuk semakin aktif menjalin hubungan internasional.

Semangat ini kemudian mendorong Bandung untuk memperluas jejaring kemitraan internasional melalui kerjasama *sister city* dengan berbagai kota lain, salah satunya dengan Kota Fort Worth, Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 1990.⁹ kerja sama antara Bandung dan Fort Worth mencakup berbagai sektor strategis seperti ekonomi, perdagangan, industri, dan pariwisata, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kedua kota juga bekerja sama dalam bidang administrasi pemerintahan,

⁶ Bagian Kerjasama Kota Bandung, “Sister City Kota Bandung,” *Kerjasama.Bandung.Go.Id*, 2024, 30, <https://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl>.

⁷ *Ibid*.

⁸ Nia Kania Kurniawati, “Implementasi Kebijakan Sister City Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig (Jerman),” *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 5, no. 1 (2021): 11–25, <https://doi.org/10.31506/jipags.v5i1.9426>.

⁹ Muhammad Zainal, “SKRIPSI DINAMIKA KERJA SAMA SISTER CITY ANTARA KOTA BANDUNG INDONESIA DENGAN KOTA FORT WORTH AMERIKA SERIKAT,” 2019.

pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, kepemudaan, dan keolahragaan.¹⁰ Selain dengan Kota Braunschweig dan Kota Fort Worth, Kota Bandung juga menjalin kerja sama dengan berbagai kota dari negara lain di Asia, seperti Jepang. Salah satu bentuk kerjasama konkret dengan Jepang dapat dilihat melalui kemitraan dengan Kota Kawasaki, Kota Bandung telah menjalin hubungan *sister city* dengan Kota Kawasaki, Jepang sejak 7 Juli 2015, hubungan ini kemudian diperkuat melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 18 Februari 2016, kemudian MoU tersebut kembali diperpanjang pada 6 Februari 2020 sebagai bentuk komitmen kedua pihak dalam melanjutkan kolaborasi strategis, melalui kerjasama ini, Bandung dan Kawasaki berupaya untuk saling berbagi pengetahuan, mempererat hubungan antar masyarakat, serta menciptakan peluang kolaboratif dalam pengelolaan limbah, manajemen air, dan pengendalian kualitas udara.¹¹

Meskipun aktivitas kerja sama *Sister City* Kota Bandung dengan berbagai mitra internasional telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan mencakup beragam sektor, dalam implementasinya kerja sama dengan Kota Fort Worth dan Kota Kawasaki masih menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas peran

¹⁰ Masfi Sya'fiatul Ummah, "NASKAH KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA BANDUNG DENGAN PEMERINTAH KOTA FORT WORTH NEGARA BAGIAN TEXAS TENTANG PERSAHABATAN DAN KERJASAMA KOTA," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, [http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

¹¹ Bagian Kerjasama Kota Bandung, "Sister City Kota Bandung," *Kerjasama.Bandung.Go.Id*, 2024, 30, <https://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl>.

Pemerintah Kota Bandung sebagai aktor sub-nasional dalam menjalankan paradiplomasi. Hal ini disampaikan langsung oleh staf Bagian Kerja Sama Kota Bandung, yakni Ibu Nadia Adelliani dan Ibu Ira Ekwati, yang bertanggung jawab dalam urusan kerja sama luar negeri, beliau menyatakan bahwa pelaksanaan kerja sama *Sister City* Kota Bandung hingga saat ini masih menghadapi kendala yang cukup serius, khususnya dalam hubungan dengan mitra Kota Fort Worth dan Kota Kawasaki.¹² Tantangan yang dihadapi dalam kerja sama antara Kota Bandung dengan mitra Kota Fort Worth dan Kota Kawasaki berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan kerja sama *Sister City* yang telah dibangun sejak lama, yang mana dampak tersebut tercermin pada tidak berjalannya sejumlah kegiatan yang telah direncanakan.¹³

Berdasarkan temuan empiris yang diperoleh melalui data wawancara, penulis memandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kemunculan tantangan dalam pelaksanaan kerja sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Fort Worth dan Kota Kawasaki. Untuk mengkaji fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teoritis paradiplomasi yang dikemukakan oleh Alexander Kuznetsov, yang mana dari sebelas dimensi yang ditawarkan dalam teori tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada dimensi konstitusional dan institusional. Kedua dimensi tersebut dipilih karena paling relevan dalam menjelaskan temuan empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa

¹² Wawancara Penulis Dengan Ibu Nadia Adelliani Ernanda, S.S. Tim Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri, Bagian Kerjasama Luar Negeri . Pada 22 Mei 2025,” n.d.

¹³ “Wawancara Penulis Dengan Ibu Ira Ekwati, S.S. Tim Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri, Bagian Kerjasama Luar Negeri . Pada 22 Mei 2025,” n.d.

tantangan-tantangan tersebut muncul dan memengaruhi pelaksanaan kerja sama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Fort Worth dan Kota Kawasaki.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang harus diselesaikan melalui penelitian ini yaitu “Mengapa muncul tantangan dalam pelaksanaan kerja sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Fort Worth dan Kota Kawasaki?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan Kerja sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Fort Worth dan Kota Kawasaki.
- b. Untuk menjelaskan mengapa kerja sama *sister city* Kota Bandung dengan Kota Fort Worth dan Kota Kawasaki menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang akademik, khususnya dalam studi Hubungan Internasional dalam bidang kerja sama internasional dengan menganalisis tantangan yang di alami oleh pemerintah kota Bandung dalam menjalankan praktik paradiplomasi khususnya *sister city*. Melalui teori paradiplomasi yang dikemukakan oleh Kuznetsov,

peneliti menganalisis sejauh mana prosedur birokrasi dan keterbatasan dana memengaruhi pelaksanaan kerja sama internasional, teori ini juga dimanfaatkan peneliti untuk menelaah bagaimana hal tersebut berdampak terhadap efektifitas praktik paradiplomasi di Kota Bandung

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan Kerjasama internasional khususnya paradiplomasi di Kota Bandung. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memahami secara detail bagaimana tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan kegiatan kerja sama internasional, pemahaman ini diharapkan dapat menjadi literatur mengenai praktik paradiplomasi di tingkat lokal serta menjadi dasar bagi studi lanjutan yang relevan. Bagi Pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola Kerjasama luar negeri, baik dari segi kelembagaan, maupun strategi dalam terlibatnya aktor lokal. Peneliti juga berharap bahwa studi ini dapat mendukung upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah sebagai aktor yang efektif dan terlibat langsung dalam dinamika global.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan analisis untuk mengevaluasi penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai praktik paradiplomasi dan peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menjalin kerja sama internasional untuk

mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri menggunakan hak otonomi daerah yang telah diberikan pemerintah pusat. Penjelasan penelitian terdahulu bukan hanya sebagai pembatas untuk menghindari tumpang tindih dan kesamaan dengan riset sebelumnya, namun juga memainkan peran penting dalam memperkaya informasi terkait riset ini karena topik yang pemilik angkat memiliki kesamaan kondisi, sehingga menjadikan penelitian terdahulu menjadi rujukan yang relevan bagi penulis. Dengan memanfaatkan penelitian pengetahuan yang diperoleh dalam penelitian terdahulu, peneliti mendapatkan pandangan yang lebih luas dan mendalam, serta mampu turut serta dalam berkontribusi pada pengembangan pemahaman terhadap paradiplomasi. Berikut ini penulis lampirkan penelitian terdahulu yang telah menjadi rujukan penulis.

Penelitian Pertama yang digunakan penulis, dilakukan oleh Alexander Kuznetsov pada bukunya yang berjudul *"Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs* karya Alexander Kuznetsov (2014)".¹⁴ Kuznetsov memahami paradiplomasi sebagai aktivitas hubungan luar negeri yang dilakukan oleh aktor subnasional, khususnya pemerintah daerah dalam rangka memperjuangkan kepentingan lokal di tingkat internasional, dalam bukunya Kuznetsov mengemukakan sebelas dimensi paradiplomasi untuk menganalisis praktik hubungan luar negeri aktor subnasional. Namun dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan analisis pada dua dimensi yaitu dimensi konstitusional dan institusional,

¹⁴ Alexander Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy, Theory and Practice of Paradiplomacy*, 2014, <https://doi.org/10.4324/9781315817088>.

yang mana temuan ini relevan dengan konteks penelitian saat ini karena memberikan kerangka analisis yang sistematis untuk menelaah sejauh mana kewenangan hukum dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yaitu kurangnya pendanaan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kerja sama internasional di tingkat lokal.

Penelitian kedua dilakukan oleh Takdir Ali Mukti dalam bukunya yang berjudul "***Paradiplomacy: Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah di Indonesia (2013)***"¹⁵. Dalam buku tersebut, Mukti menjelaskan paradiplomasi di Indonesia sebagai bentuk hubungan dan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dalam praktiknya banyak diwujudkan melalui skema *sister city* atau kota kembar. Sejak bagian awal Mukti menguraikan secara sistematis mengenai kerangka regulasi dan peraturan teknis pelaksanaan paradiplomasi di Indonesia, mulai dari dasar hukum, mekanisme administratif, hingga prosedur koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pembahasan mengenai aturan teknis pelaksanaan paradiplomasi tersebut sejalan dengan penelitian ini yang menjelaskan mengenai perkembangan paradiplomasi di Indonesia sejak awal khususnya dalam konteks hubungan luar negeri pemerintah daerah melalui skema *sister city*.

¹⁵ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, 2013, https://www.researchgate.net/publication/342122523_PARADIPLOMACY_KERJASAMA_LUAR_NEGERI_OLEH_PEMDA_DI_INDONESIA.

Penelitian Ketiga dilakukan oleh Endra Wijaya dan Geraldine Renyanthi (2020)¹⁶ mengenai kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri dari perspektif hukum administrasi negara memberikan landasan penting untuk memahami kerangka hukum paradiplomasi di Indonesia. Dalam artikelnya yang berjudul **“Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri (Perspektif Hukum Administrasi Negara)”**, keduanya menyoroti bahwa praktik kerjasama luar negeri oleh daerah telah memiliki dasar legal yang jelas melalui sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ketiganya memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama lintas negara, selama tidak mencampuri urusan yang menjadi kewenangan eksklusif pemerintah pusat. Temuan ini relevan dengan konteks penelitian saat ini karena memperlihatkan bagaimana kewenangan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibentuk melalui proses hukum yang terstruktur dan bertahap. Pemahaman atas kerangka hukum ini menjadi pijakan penting bagi peneliti untuk menelaah dinamika paradiplomasi di tingkat lokal, khususnya dalam melihat bagaimana kebijakan nasional meringkai ruang gerak daerah dalam hubungan internasional.

¹⁶ Endra Wijaya, “Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dan Pihak Luar Negeri (Perspektif Hukum Administrasi Negara) from the Ministry of Education of Republic of Indonesia View Project Legal Language; Criminal Law View Project,” no. September (2020), <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1707>.

Penelitian keempat dilakukan oleh Nabila Safitri, Sisilia Putri Syafira, dan Dyah Estu Kurniawati (2023)¹⁷ yang membahas tentang kegagalan kerjasama *Sister City* di Indonesia. Dalam artikelnya berjudul "***Analisa Faktor Penyebab Kegagalan Sister Cities di Indonesia***", para peneliti menyoroti bahwa tidak semua kerjasama *Sister City* yang dijalankan oleh pemerintah daerah mampu mencapai hasil yang optimal, bahkan sebagian besar justru mengalami gagal dalam pelaksanaannya secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis terhadap 20 jurnal yang relevan, ditemukan bahwa kegagalan tersebut dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Temuan dari penelitian ini adalah Faktor internal mencakup kurangnya komunikasi antara pihak yang bekerjasama, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat, sementara itu, faktor eksternal meliputi perubahan kebijakan dari masing-masing kota, dinamika kebijakan global, hingga kendala yang muncul akibat pandemi COVID-19. Temuan ini penting dalam konteks penelitian saat ini karena memperkuat asumsi bahwa meskipun kerangka hukum dan peluang kerjasama telah tersedia, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan struktural, dalam konteks studi paradiplomasi Kota Bandung penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai penyebab umum kegagalan kerjasama *Sister City* di Indonesia, termasuk yang terjadi di Bandung. Studi ini menegaskan perlunya perhatian pada aspek kelembagaan, keberlanjutan kebijakan antar periode pemerintahan, serta keterlibatan masyarakat

¹⁷ Safitri, Syafira, and Kurniawati, "Analisa Faktor Penyebab Kegagalan Sister Cities Di Indonesia."

dalam proses kerjasama luar negeri, oleh karena itu, evaluasi terhadap dinamika internal pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam memahami efektivitas pelaksanaan paradiplomasi secara menyeluruh.

Penelitian kelima dilakukan oleh Jovanscha Qisty Adinda, Arry Bainus, dan Riswanda (2020)¹⁸ yang mengevaluasi implementasi kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dan Kota Seoul, dalam artikelnya yang berjudul “*Evaluasi Kerjasama Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Sister Cities antara Kota Bandung dan Kota Seoul)*” mereka menelusuri sejauh mana kerjasama ini memenuhi lima elemen evaluasi *Sister City* menurut UNDP, yakni komitmen, partisipasi masyarakat, kesepahaman, timbal balik, dan hasil nyata. Studi ini menemukan bahwa secara legal kerjasama ini telah diformalkan melalui MoU sejak 2016, dengan berbagai program kerjasama seperti pengembangan kebudayaan, investasi, pertukaran aparatur sipil, dan revitalisasi lingkungan kota. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun kerjasama telah menghasilkan sejumlah kegiatan nyata seperti pembangunan “Little Bandung” di Seoul, festival budaya bersama, dan pelatihan ASN, implementasinya belum sepenuhnya berkelanjutan dikarenakan beberapa program yang dirancang bersama masih belum terlaksana secara konsisten, bahkan kerjasama mulai menunjukkan tanda stagnasi setelah tahun pertama pelaksanaan. Selain itu, keberhasilan kerjasama ini banyak bergantung pada inisiatif dari Kota Seoul, sementara

¹⁸ Jovanscha Qisty Adinda, Arry Bainus, and Riswanda, “EVALUASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus Sister Cities Antara Kota Bandung Dan Kota Seoul),” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2020): 351.

partisipasi masyarakat lokal dan keberlanjutan kebijakan dari sisi Kota Bandung dinilai belum maksimal. Studi ini memberikan gambaran konkret bagaimana dinamika internal pemerintah daerah dan keberlanjutan kebijakan menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlangsungan kerjasama *Sister City*. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi terhadap kasus Bandung dan Seoul menjadi pijakan penting untuk memahami sejauh mana tantangan kelembagaan, koordinasi, serta kepemimpinan politik memengaruhi efektivitas praktik paradiplomasi di tingkat lokal.

Penelitian keenam dilakukan oleh Ivana Salsabila (2025)¹⁹ yang membahas dinamika kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dan Kota Braunschweig, Jerman. Dalam artikelnya yang berjudul “***Faktor Hambatan Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Braunschweig***”, Ivana menelusuri sejarah panjang kerjasama kedua kota sejak tahun 1960, yang merupakan kerjasama *Sister City* pertama di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerjasama telah diformalisasi melalui berbagai dokumen seperti Piagam Persahabatan, *Memorandum of Understanding* (MoU), implementasinya mengalami berbagai tantangan yang menyebabkan kerjasama berjalan stagnan. Temuan dari penelitian ini adalah sejumlah hambatan yang mempengaruhi kelangsungan kerjasama, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya komunikasi antarpihak, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah, serta tumpang tindih

¹⁹ Article Informations et al., “FAKTOR HAMBATAN KERJASAMA SISTER CITY KOTA BANDUNG DENGAN BRAUNSCHWEIG” 02, no. 01 (2025).

birokrasi yang menghambat proses pengambilan keputusan, selain itu, dinamika politik lokal seperti perubahan visi kepala daerah juga turut memengaruhi keberlangsungan kerjasama. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup krisis ekonomi di Eropa, perbedaan zona waktu, serta kendala bahasa dan budaya yang memperumit proses koordinasi. Temuan ini relevan dengan konteks penelitian saat ini karena memberikan gambaran konkret bahwa keberhasilan kerjasama *Sister City* tidak hanya bergantung pada kesepakatan formal semata, tetapi juga pada kapasitas internal pemerintah daerah dalam mengelola hubungan luar negeri secara konsisten. Dalam studi ini, kerjasama Bandung dan Braunschweig menjadi contoh nyata bahwa faktor kelembagaan, kepemimpinan politik, dan efektivitas komunikasi sangat menentukan keberlanjutan praktik paradiplomasi di tingkat kota.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Hafiq Allhadad, Hafid Adim Pradana, dan Havidz Ageng Prakoso (2025)²⁰ dalam artikelnya yang berjudul “*Tantangan praktik paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya pada periode 2020-2024*”. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi Surabaya, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan regulasi yang kompleks, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menerapkan teori paradiplomasi Alexander Kuznetsov, khususnya pada dua dimensi yaitu dimensi konstitusional dan dimensi institusional. Temuan dari penelitian ini adalah bagaimana

²⁰ Hafiq Allhadad, Hafid Adim Pradana, and Havidz Ageng Prakoso, “Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya 2020-2024” 10, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.14710/jiip.v10i1.25751>.

birokrasi yang panjang serta keterbatasan anggaran dan prioritas kebijakan lokal berkontribusi terhadap lambatnya implementasi kerjasama internasional, meskipun potensi dan pengalaman Kota Surabaya dalam menjalin relasi luar negeri cukup signifikan. Studi ini juga menekankan pentingnya reformasi sistem regulasi dan pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih efisien untuk mendukung keberlanjutan program paradiplomasi di tingkat lokal, temuan ini sangat relevan bagi penelitian saat ini karena memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika dan tantangan yang kerap dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan kerjasama internasional secara efektif.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Selvinda Novintan Putri (2017)²¹ yang mengkaji kegagalan kerjasama Sister City antara Kota Semarang dan Kota Beihai, Tiongkok. Dalam tulisannya yang berjudul ***“Kegagalan Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Semarang dengan Kota Beihai”***, Selvinda menelusuri proses kerjasama sejak penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) pada tahun 2007 hingga MoU pada tahun 2008, serta berbagai faktor yang menyebabkan kerjasama tersebut terhenti. Meskipun secara formal telah ditetapkan ruang lingkup kerjasama di bidang pelabuhan, pendidikan, lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata, program-program yang disepakati tidak pernah berjalan secara konkret hingga tahun 2016. Studi ini menemukan bahwa tidak adanya tindak lanjut dari kedua belah pihak menjadi

²¹ Selvinda Novintan Putri, “Kegagalan Kerjasama Sister City Kota Semarang,” *Departemen Ilmu Politik Dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro* 6, no. 2 (2017): 1–16, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16119>.

penyebab utama terhentinya Kerjasama, dari pihak Pemerintah Kota Semarang, hambatan seperti lemahnya inisiatif kelembagaan, keterbatasan staf, rendahnya penguasaan bahasa asing, serta minimnya pendampingan dari pemerintah provinsi turut memperburuk kondisi, dan di sisi lain, dari pihak Beihai, kebijakan kepemimpinan menjadi faktor penghambat yang signifikan, penelitian ini juga mencatat bahwa birokrasi yang rumit, pembatasan administratif dalam kunjungan luar negeri, serta mutasi pejabat turut menyebabkan ketidakberlanjutan kerjasama. Temuan ini penting dalam konteks penelitian saat ini karena menunjukkan bahwa keberhasilan kerjasama *Sister City* tidak cukup hanya mengandalkan kemiripan karakteristik atau kesamaan potensi, tetapi membutuhkan tata kelola kelembagaan yang responsif, komunikasi dua arah yang aktif, serta kesinambungan kebijakan antar periode. Studi ini memperkuat argumen bahwa paradiplomasi yang efektif sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional dan dukungan politik yang berkelanjutan dari kedua belah pihak.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Nasywa Aisyiah Hilda Jannati dan Dina melalui artikel jurnal berjudul ***“Kerja Sama Sister City Bandung-Kawasaki dalam Pengembangan Masyarakat Bebas Karbon di Kota Bandung Tahun 2020-2024²²”*** Penelitian ini membahas kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Kawasaki dalam program *Zero Carbon Society* sebagai bentuk paradiplomasi lingkungan yang bertujuan mengurangi emisi karbon melalui penghematan energi dan

²² Nasywa Aisyiah and Hilda Jannati, “Kerjasama Sister City Bandung – Kawasaki Dalam Pengembangan Masyarakat Bebas Karbon Di Kota Bandung Tahun 2020-2024,” no. 1 (2025): 1–12.

peningkatan mobilitas berkelanjutan. Studi ini menganalisis implementasi program, mekanisme kerja sama, serta hambatan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya keterbatasan pendanaan dan kendala regulasi. Penelitian penulis memiliki titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasywa Aisyiah Hilda Jannati dan Dina, secara substantif perbedaan mendasar terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Jannati dan Dina secara khusus menganalisis implementasi kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Kawasaki dalam program *Zero Carbon Society* pada periode 2020-2024, dengan menitikberatkan pada bentuk program, mekanisme pelaksanaan, serta hambatan teknis dan regulasi yang dihadapi. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada tantangan paradiplomasi lingkungan Kota Bandung dalam program zero carbon pada periode tahun 2021- 2024. Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peran pemerintah daerah dalam menjalin dan mengimplementasikan kerja sama internasional melalui skema *sister city* untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon.

Penelitian Kesepuluh dilakukan oleh Reynaldi Mandala Putra, Junita Budi Rachman, dan Windy Dermawan yang berjudul "***Bandung as an International Relations Actor Through the Collaboration of Bandung and Fort Worth Sister City in International Leadership Academy Program***"²³. Penelitian ini menggunakan

²³ Reynaldi Mandala Putra, Junita Budi Rachman, and Windy Dermawan, "Bandung as an International Relations Actor Through the Collaboration of Bandung and Fort Worth Sister City in International Leadership Academy Program," *International Journal of Social Science and Business* 6, no. 1 (2022): 66–71, <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i1.40126>.

metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Secara konseptual, penelitian ini menggunakan konsep kerja sama internasional dan konsep *sister city* untuk menjelaskan posisi Kota Bandung sebagai aktor hubungan internasional. Fokus utama penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana Kota Bandung menampilkan dirinya sebagai subjek hubungan internasional melalui implementasi kerja sama *sister city* dengan Kota Fort Worth dalam program International Leadership Academy (ILA), yang melibatkan pengiriman siswa SMA sebagai delegasi Kota Bandung sejak tahun 2010 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kota Bandung hadir secara konsisten dalam program ILA, peran Pemerintah Kota Bandung dinilai belum optimal, terutama dalam aspek dukungan pendanaan, keterlibatan kelembagaan, serta sosialisasi program.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Putra, Rachman, dan Dermawan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan sudut pandang analisis yang mana penelitian ini menekankan pada eksistensi dan peran Kota Bandung sebagai aktor hubungan internasional melalui partisipasi dalam program ILA sebagai bagian dari kerja sama *sister city* Bandung dengan Fort Worth. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada tantangan dan hambatan pelaksanaan kerja sama *sister city* Bandung dan Fort Worth, khususnya dalam konteks keberlanjutan dan efektivitas program ILA dari perspektif pemerintah daerah. Adapun persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji program *International Leadership Academy* (ILA) sebagai bagian dari praktik paradiplomasi pemerintah daerah, serta

menempatkan Pemerintah Kota Bandung sebagai aktor subnasional dalam hubungan internasional.

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

No	Judul Dan Nama Penelitian	Jenis Penelitian Dan Alat Analisa	Hasil
1.	<p>Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs</p> <p>Penulis : Alexander Kuznetsov</p>	Kualitatif (studi konseptual-teoretis)	<p>Penelitian ini menjelaskan paradiplomasi sebagai aktivitas hubungan luar negeri yang dilakukan oleh aktor subnasional, khususnya pemerintah daerah, untuk memperjuangkan kepentingan lokal di tingkat internasional. Kuznetsov mengemukakan sebelas dimensi paradiplomasi sebagai kerangka analisis, yang mencakup aspek konstitusional, institusional, ekonomi, hingga identitas. Kerangka ini memberikan alat analisis sistematis untuk menilai kewenangan hukum dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerja sama internasional.</p>
2.	<p>Paradiplomacy : Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah di Indonesia</p> <p>Penulis : Takdir Ali Mukti</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik paradiplomasi di Indonesia, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk <i>sister city</i> dan <i>sister province</i>, memiliki landasan hukum yang kuat. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang yuridis bagi pemerintah daerah untuk menjalin</p>

			kerja sama dengan pihak asing. Buku ini menekankan pentingnya kerangka regulasi, tata kelola, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan paradiplomasi.
3.	<p>Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri (Perspektif Hukum Administrasi Negara)</p> <p>Penulis : Endra Wijaya & Geraldine Renyanthi</p>	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama luar negeri oleh daerah telah memiliki dasar legal yang jelas melalui sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ketiganya memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama lintas negara, selama tidak mencampuri urusan yang menjadi kewenangan eksklusif pemerintah pusat
4.	<p>Analisa Faktor Penyebab Kegagalan Sister Cities di Indonesia</p> <p>Penulis : Nabila Safitri, Sisilia Putri Syafira & Dyah Estu Kurniawati</p>	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor internal kegagalan sister cities di Inonesia mencakup kurangnya komunikasi antara pihak yang bekerjasama, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perubahan kebijakan dari masing-masing kota, dinamika kebijakan global, hingga kendala yang muncul akibat pandemi COVID-19.
5.	<p>Evaluasi Kerjasama Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Sister</p>	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerjasama sister city telah menghasilkan sejumlah kegiatan nyata seperti

	<p>Cities antara Kota Bandung dan Kota Seoul)</p> <p>Penulis: Jovanscha Qisty Adinda, Arry Bainus & Riswanda</p>		<p>pembangunan “<i>Little Bandung</i>” di Seoul, festival budaya bersama, dan pelatihan ASN, implementasinya belum sepenuhnya berkelanjutan. Beberapa program yang dirancang bersama masih belum terlaksana secara konsisten, bahkan kerjasama mulai menunjukkan tanda stagnasi setelah tahun pertama pelaksanaan, selain itu keberhasilan kerjasama ini banyak bergantung pada inisiatif dari Kota Seoul, sementara partisipasi masyarakat lokal dan keberlanjutan kebijakan dari sisi Kota Bandung dinilai belum maksimal</p>
6.	<p>Faktor Hambatan Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Braunschweig</p> <p>Penulis : Ivana Salsabila</p>	<p>Deskriptif Analitik Dengan Pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang memengaruhi kelangsungan kerjasama, terbagi atas dua jenis baik dari faktor internal maupun eksternal, faktor internal meliputi kurangnya komunikasi antarpihak, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah, serta tumpang tindih birokrasi yang menghambat proses pengambilan keputusan, selain itu, dinamika politik lokal seperti perubahan visi kepala daerah juga turut memengaruhi keberlangsungan kerjasama. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup krisis ekonomi di Eropa, perbedaan zona waktu, serta kendala bahasa dan budaya yang memperumit proses koordinasi.</p>
7	<p>Tantangan praktik paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya pada</p>	<p>Metode deskriptif analitis</p> <p>Pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tersebut berdampak signifikan pada kredibilitas Surabaya di mata mitra internasional dan menghambat</p>

	<p>periode 2020-2024.</p> <p>Penulis : Hafiq Allhadad, Hafid Adim Pradana & Havidz Ageng Prakoso</p>		<p>optimalisasi potensi kerjasama yang ada. Studi ini juga menekankan pentingnya reformasi sistem regulasi dan pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih efisien untuk mendukung keberlanjutan program paradiplomasi di tingkat lokal</p>
8	<p>Kegagalan Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Semarang dengan Kota Beihai</p> <p>Penulis : Selvinda Novintan Putri</p>	<p>Metode observasi kualitatif</p> <p>Pendekatan Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Pemkot Semarang dalam menjalin kerjasama sister city adalah karena kesamaan karakteristik, memiliki keterikatan hubungan dengan Kota Beihai serta ketertarikan pada budaya kerja yang ada di China, salah satunya Kota Beihai. Dalam proses kerjasama, pada tahun 2008 MoU telah ditandatangani, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut sehingga kerjasama terhenti. Adapun kendala-kendala yang menyebabkan kerjasama tersebut terhenti adalah dari pihak Pemkot Semarang tidak ada inisiatif untuk melakukan gagasan ide untuk program keberlanjutan sister city. Sedangkan dari pihak Beihai tidak lain adalah karena faktor kebijakan pemimpin pada saat itu. Terkait</p>
9	<p>Kerja Sama Sister City Bandung Kawasaki dalam Program Zero Carbon</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini membahas implementasi kerja sama <i>sister city</i> antara Kota Bandung dan Kota Kawasaki dalam program Zero Carbon sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini berkontribusi pada pertukaran pengetahuan dan praktik kebijakan lingkungan, khususnya dalam isu</p>

			pengurangan emisi karbon. Namun, penelitian ini masih berfokus pada periode sebelum 2021 dan terbatas pada kerja sama Bandung dan Kawasaki
10	Bandung as an International Relations Actor Through the Collaboration of Bandung and Fort Worth Sister City in International Leadership Academy Program Penulis : Reynaldi Mandala Putra, Junita Budi Rachman, & Windy Dermawan	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bandung hadir sebagai aktor hubungan internasional melalui partisipasi berkelanjutan dalam program International Leadership Academy (ILA) bersama Kota Fort Worth. Meskipun demikian, peran Pemerintah Kota Bandung dinilai belum optimal akibat minimnya dukungan pendanaan, keterlibatan kelembagaan yang terbatas, serta kurangnya sosialisasi program, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan kerja sama <i>sister city</i> .

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Paradiplomasi

Secara etimologis, istilah paradiplomasi berasal dari Bahasa Yunani, “*para*” yang berarti "di samping", "dekat", atau "berdampingan". Dalam konteks hubungan internasional, sejumlah ahli berpendapat bahwa paradiplomasi merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh aktor subnasional seperti pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung, meniru, melengkapi, mengkritisi, atau bahkan menentang praktik diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah pusat.²⁴ Seiring berkembangnya praktik hubungan internasional oleh aktor non-negara, paradiplomasi tidak lagi sekedar dilihat

²⁴ Helga Margareth, “Paradiplomacy: Cities and States as Global Player,” *Экономика Региона*, 2017, 32.

dari sisi etimologis, tetapi juga dipahami sebagai suatu fenomena politik yang nyata dalam dinamika global. Dalam hal ini, Kuznetsov menjelaskan bahwa paradiplomasi merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di suatu negara dengan pemerintah daerah di negara lain, yang bertujuan untuk memperoleh berbagai kepentingan, baik di bidang ekonomi, budaya, politik, maupun kepentingan strategis lainnya.²⁵

Kuznetsov menegaskan bahwa paradiplomasi dijalankan oleh pihak lokal atau wilayah administratif yang berada di bawah pemerintah pusat, yang secara mandiri membangun hubungan dengan aktor asing baik pemerintahan maupun non pemerintahan dalam rangka memperoleh manfaat di tingkat internasional. Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor aktif dalam jejaring global, tidak hanya sebagai pelengkap kebijakan luar negeri nasional, tetapi juga sebagai pelaku yang memiliki kepentingan dan strategi sendiri.²⁶ Dalam upaya memahami dinamika pelaksanaan paradiplomasi, khususnya dalam konteks Pemerintah Kota Bandung, Teori Kuznetsov menawarkan kerangka analisis dengan sebelas dimensi, dua di antaranya menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dimensi konstitusional dan dimensi institusional.²⁷

²⁵ Rahmi Diah Winatra, "Paradiplomasi : Alasan Kota Bandung Melakukan Kerjasama Sister City Dengan Kota Namur (Belgia) Tahun 2017," *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif*, 2019, 1–4.

²⁶ Suci elvionita, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU PELAKSANAAN PARADIPLOMASI 34 PROVINSI DI INDONESIA" (2016).

²⁷ Alexander Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy, Theory and Practice of Paradiplomacy*, 2014, <https://doi.org/10.4324/9781315817088>

Paradiplomasi tidak hanya mencerminkan keaktifan pemerintah daerah dalam membangun hubungan internasional, tetapi juga membutuhkan dukungan kelembagaan dan strategi yang terstruktur. Dalam tulisannya, Kuznetsov menjelaskan bahwa proses institusionalisasi kerjasama paradiplomasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan internal daerah, terutama dalam membangun mekanisme kerja yang mendukung, menyoroti bentuk institusionalisasi yang dianggap krusial antara lain pembentukan badan khusus yang menangani urusan luar negeri di lingkungan pemerintah daerah, penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang hubungan internasional dan ekonomi, serta pendirian kantor perwakilan daerah di luar negeri untuk memperkuat hubungan diplomatik secara langsung, selain itu praktik seperti kunjungan resmi ke daerah mitra, penyelenggaraan forum pameran antarwilayah, pembentukan jejaring lintas batas, hingga keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh mitra luar negeri juga merupakan elemen penting yang dapat memperkuat efektivitas kerjasama. Keseluruhan unsur tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan paradiplomasi sangat ditentukan oleh sejauh mana daerah mampu membangun struktur, sumber daya, dan hubungan yang mendukung pelaksanaan kerjasama internasional secara berkelanjutan.²⁸

Dimensi konstitusional merujuk pada aspek hukum dan peraturan yang menjadi dasar legal bagi keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional.

²⁸ NADIYAH KHOLILAH YAHYA, "INSTITUSIONALISASI KERJA SAMA PARADIPLOMASI NTB DENGAN BUKHARA DALAM MEMBANGUN SEKTOR PARIWISATA HALAL," *Braz Dent J.* (2022).

Konstitusi dan regulasi nasional berperan penting dalam menentukan sejauh mana kewenangan daerah dapat dijalankan tanpa bertentangan dengan arah kebijakan luar negeri nasional. Selain itu, dimensi ini juga mencakup mekanisme koordinasi dan pengawasan yang menghubungkan pemerintah pusat dengan daerah dalam konteks paradiplomasi.²⁹ Sementara itu, dimensi institusional menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan, struktur organisasi, serta mekanisme administratif seperti pendanaan yang mendukung pelaksanaan kerjasama internasional di tingkat lokal, hal ini mencakup pembentukan unit kerja khusus, penempatan sumber daya manusia yang kompeten, hingga pengembangan jaringan kerjasama yang berkelanjutan.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, teori paradiplomasi yang dikemukakan oleh Alexander Kuznetsov digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan kerja sama internasional, khususnya melalui skema *Sister City* dengan mitra Kota Fort Worth dan Kota Kawasaki pada periode 2021–2024. Teori ini dinilai relevan karena menawarkan kerangka analitis yang komprehensif dalam memahami dinamika paradiplomasi aktor sub-nasional, terutama melalui dimensi konstitusional dan dimensi institusional yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Dimensi konstitusional dalam teori Kuznetsov menekankan aspek hukum dan prosedural yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama

²⁹ Alexander Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy, Theory and Practice of Paradiplomacy*, 2014, <https://doi.org/10.4324/9781315817088>

³⁰ *Ibid.*

luar negeri. Berdasarkan temuan empiris, prosedur birokrasi yang kompleks dan berlapis menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kerja sama *Sister City* Kota Bandung. Sementara itu, dimensi institusional mencakup kesiapan kelembagaan, struktur organisasi, mekanisme administratif, serta dukungan pendanaan. Namun, hasil wawancara penulis dengan staf bagian kerja sama Kota Bandung menunjukkan bahwa dari berbagai aspek tersebut, tantangan yang paling dominan dalam kerja sama Kota Bandung terletak pada aspek pendanaan. Aspek lain dalam dimensi institusional, seperti kesiapan kelembagaan, struktur organisasi, dan mekanisme administratif, tidak ditemukan sebagai tantangan dalam pelaksanaan kerja sama *Sister city*. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis dimensi institusional pada aspek pendanaan, karena faktor tersebut paling relevan dengan temuan empiris dan secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan kerja sama *Sister City* Kota Bandung.

1.5.2 Konsep *Sister city*

Sister city merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari dua kota yang berasal dari negara berbeda, kerja sama ini bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan melalui pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman dalam berbagai bidang pembangunan daerah. Dalam bukunya yang berjudul “Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia”, Takdir Ali Mukti menjelaskan bahwa kerja sama

sister city menjadi bentuk paling umum dari keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri sekaligus menunjukkan peran pemerintah daerah sebagai aktor transnasional yang aktif menjalin kerja sama lintas negara.³¹

Dalam penerapan konsep *sister city*, khusus terkait pengaturan kerja sama *Sister Province* dan *Sister City*, Pemerintah Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 193/1652/PUOD/1993 yang terbit pada 26 April 1993, surat edaran ini mengatur tata cara pembentukan hubungan kerjasama antar kota (*sister city*) dan antar provinsi (*sister province*), baik di dalam negeri maupun dengan pihak luar negeri, sejak saat itu sejumlah pemerintah daerah di Indonesia mulai menjalin kerjasama internasional dengan kota atau wilayah lain di luar negeri, terutama yang memiliki kesamaan dalam aspek teknologi, pendidikan, budaya, maupun latar belakang sejarah.³²

Surat edaran ini menetapkan sejumlah ketentuan dan kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut mencakup adanya kesetaraan dalam kedudukan dan status administrasi, kesamaan dalam skala serta fungsi pemerintahan, kemiripan karakteristik wilayah, serta kesamaan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kerja sama juga diharapkan didukung oleh potensi alih ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya

³¹ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013)

³² Bagian Kerjasama Kota Bandung, "Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL)," *Bagian Kerjasama Kota Bandung*, 2021, 1–15.

hubungan komplementer di bidang ekonomi antara kedua pihak yang memungkinkan terjadinya arus barang secara timbal balik.³³

Setidaknya terdapat empat manfaat yang dapat diperoleh aktor subnasional melalui pembentukan hubungan luar negeri pada tingkat lokal dalam kerangka kerja sama *sister city*. Pertama, kerja sama dengan pemerintah atau aktor subnasional dari negara maju membuka peluang akses terhadap tenaga ahli dari berbagai bidang. Kedua, aktor subnasional dari negara berkembang berpotensi memperoleh akses terhadap pendidikan tinggi melalui kemitraan tersebut. Ketiga, kerja sama *sister city* memungkinkan aktor subnasional dari negara berkembang memperoleh manfaat ekonomi, khususnya melalui peluang investasi yang ditawarkan oleh mitra dari negara maju. Keempat, melalui program pertukaran dan pengembangan budaya, negara berkembang dapat menegaskan identitas budayanya secara politis di tingkat internasional.³⁴

Untuk memastikan pelaksanaan kerjasama *sister city* berjalan sesuai ketentuan, pemerintah mengacu pada regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2020, dalam pasal 9 peraturan tersebut disebutkan bahwa terdapat sebelas tahapan yang harus dilalui dalam proses pembentukan kerjasama antar daerah, yaitu:

³³ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013).

³⁴ R M T Nurhasan Affandi and Windy Dermawan, "THE GOVERNMENT OF BANDUNG CITY ' S EFFORTS IN UTILIZING FOREIGN SOURCES : Case Study in Sister City Cooperation" 6, no. 2 (2021): 124–36.

1. Prakarsa, yaitu inisiatif awal dari salah satu pihak;
2. Penjajakan, meliputi identifikasi potensi dan kesesuaian kerjasama;
3. Pernyataan kehendak kerjasama, berupa komitmen awal dari kedua belah pihak;
4. Penyusunan rencana kerjasama, untuk menentukan ruang lingkup dan tujuan kerjasama;
5. Persetujuan DPRD, sebagai bentuk legitimasi dari lembaga legislatif daerah;
6. Verifikasi, untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen;
7. Penyusunan rancangan naskah kerjasama;
8. Pembahasan naskah kerjasama, antara kedua daerah yang akan bekerjasama;
9. Persetujuan Menteri Dalam Negeri, sebagai bentuk pengawasan dan persetujuan dari pemerintah pusat;
10. Penandatanganan naskah kerjasama oleh kepala daerah;
11. Pelaksanaan kerjasama, berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.³⁵

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan

³⁵ Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri.”

mengapa tantangan dalam pelaksanaan kerja sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Fort Worth dan Kota Kawasaki dapat terjadi. Menurut Ulber Silalahi, penelitian eksplanatif merupakan metode penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu fenomena melalui analisis hubungan antara dua variabel atau lebih, yang mana hubungan antarvariabel tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori sebagai alat analisis.³⁶

Melalui metode eksplanatif, penelitian ini berupaya menjelaskan keterkaitan antara dinamika pelaksanaan paradiplomasi oleh Pemerintah Kota Bandung dengan munculnya berbagai tantangan dalam kerja sama *Sister City*. Sehingga dalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan analisis terhadap mengapa tantangan dalam pelaksanaan kerja sama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Fort Worth dan Kota Kawasaki dapat terjadi khususnya pada tahun 2021-2024, dengan merujuk pada kerangka paradiplomasi yang dikemukakan oleh Alezander Kuznetsov, yang memandang pemerintah daerah sebagai aktor internasional yang memiliki kepentingan, kapasitas, serta keterbatasan dalam menjalankan hubungan luar negeri.³⁷

1.6.2 Metode Analisa Data

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena penulis akan meneliti dan menganalisa data yang berdasar pada teks tertulis dan

³⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, 2009, hal. 30.

³⁷ *ibid*, hal. 25.

mengaplikasikannya ke dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap fenomena sosial atau kebijakan tertentu, dengan menekankan pada makna, proses, dan konteks. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis atau manipulasi variabel, melainkan pada upaya menggambarkan secara rinci dan menyeluruh objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dalam konteks ini, penelitian kualitatif dipahami sebagai prosedur sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi berbentuk data non-numerik, seperti narasi, wawancara, dokumen, serta pengamatan langsung di lapangan.³⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Tahap-tahap pengumpulan data dalam penelitian kualitatif mencakup upaya untuk menyusun batasan penelitian yang jelas, menggali informasi melalui observasi langsung dan merancang data sistematis untuk merekam dan mencatat informasi yang ditemukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis.³⁹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

³⁸ Lamont Christopher, "Research Methods in International Relations - Christopher Lamont - Google Buku," no. September (2022), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=htRJEAAAQBAJ&fnd&pg=PP1&dq=Lamont,+C.+ \(2015\).+Research+Methods+in+International+Relations.+Los+Angeles:+Sage+Publications.&ots=tovEPXrhHD&sig=R7FcAydc3WCXE65A_eIN8vpkRg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=htRJEAAAQBAJ&fnd&pg=PP1&dq=Lamont,+C.+ (2015).+Research+Methods+in+International+Relations.+Los+Angeles:+Sage+Publications.&ots=tovEPXrhHD&sig=R7FcAydc3WCXE65A_eIN8vpkRg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

³⁹ JOHN W. CRESWELL J. DAVID CRESWELL, *FIFTH EDITION RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Writing Center Talk over Time*, 2018, <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>.

- a. Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan kerja sama *Sister City* Kota Bandung. Informan yang diwawancarai meliputi staf Bagian Kerja Sama Kota Bandung, khususnya Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dan salah satu guru dari SMA 5 Kota Bandung .
- b. Data Sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang bersumber dari jurnal akademik, laporan resmi pemerintah, dokumen kerja sama (seperti *Memorandum of Understanding Sister City*), buku, skripsi, tesis, berita media, serta sumber-sumber lain yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan konteks mengenai kerangka hukum paradiplomasi di Indonesia, menggambarkan sejarah hubungan *Sister City* Kota Bandung dengan berbagai mitra luar negeri, serta mengevaluasi tantangan yang memengaruhi efektivitas kerja sama internasional.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

a.) Batasan Materi

Batasan materi pada penelitian ini diperlukan agar penelitian ini tidak melebar, maka penelitian ini menetapkan batasan dengan fokus kepada tantangan internal paradiplomasi yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan kerja sama *Sister City* secara lebih spesifik, penelitian ini meliputi tantangan yang

muncul dalam pelaksanaan kerja sama antara Kota Bandung dengan mitra-mitranya, yaitu Kota Fort Worth (Amerika Serikat) dan Kota Kawasaki (Jepang).

b.) Batasan Waktu Penelitian

Pemilihan tahun 2021 sebagai awal periode dikarenakan pandemi COVID-19 yang membawa dampak signifikan terhadap dinamika kerjasama internasional, termasuk pelaksanaan skema *Sister City* oleh Pemerintah Kota Bandung khususnya dalam kerjasama Bandung dengan Fort Worth, dan dalam kurun waktu tersebut program Zero Carbon mulai dilaksanakan, berbagai tantangan muncul, baik akibat pembatasan mobilitas global maupun keterbatasan anggaran dan prioritas daerah. Tahun 2024 dipilih sebagai batas akhir karena mencerminkan kondisi terkini yang masih menunjukkan berbagai gejala bagi mitra Fort Worth, dan bagi mitra Kawasaki programnya berakhir 2024 dan tidak dapat lanjut.

1.7 Argumen Utama

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa praktik paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung tidak selalu berjalan secara optimal, meskipun terdapat berbagai inisiatif kerjasama internasional yang potensial untuk mendukung pembangunan daerah. Argumen ini didasarkan pada kenyataan bahwa kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama di tingkat pelaksanaannya, setidaknya terdapat dua faktor yang mendasari tantangan dari implementasi kerja sama *sister city* di Kota Bandung. Pertama, rumitnya sistem prosedur birokrasi yang membatasi pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama internasional, tantangan ini mencerminkan persoalan dalam dimensi konstitusional. Kedua, kendala anggaran

menyebabkan terbatasnya ruang gerak dalam menjalankan dan menjaga keberlanjutan program kerjasama yang telah dirintis, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas capaian kerjasama tersebut yang menggambarkan persoalan dalam dimensi institusional. Dengan demikian, tantangan-tantangan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari kompleksitas paradiplomasi di tingkat lokal, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan niat kerjasama, tetapi juga oleh kesiapan internal dan konsistensi kelembagaan dalam mengelola hubungan luar negeri

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan

BAB	Bahasan Pokok
BAB I Pendahuluan	1.1. Latar Belakang Masalah 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian 1.3.2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis b. Manfaat Praktis 1.4. Penelitian Terdahulu 1.5. Kerangka Teori 1.5.1. Teori Paradiplomasi 1.5.2. Konsep Sister city 1.6. Metodologi Penelitian 1.6.1. Jenis Penelitian 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 1.6.3. Teknik Analisis Data 1.6.4. Ruang Lingkup dan Batasan Waktu Penelitian 1.7. Argumen Pokok 1.8. Sistematika Penulisan
BAB II Regulasi dan Implementasi Paradiplomasi Kota Bandung	2.1 Kerangka Regulasi Paradiplomasi di Indonesia 2.1.1 Regulasi Anggaran Paradiplomasi 2.2 Pelaksanaan Paradiplomasi di Kota Bandung

BAB III Implementasi Kerja Sama <i>Sister City</i> Kota Bandung Dengan Mitra Fort Worth Dan Mitra Kawasaki	3.1. Pelaksanaan Kerja sama <i>Sister city</i> antara Kota Bandung dan Fort Worth 3.2. Pelaksanaan Kerja sama <i>Sister city</i> antara Kota Bandung dan Kawasaki
BAB IV Tantangan Implementasi Kerja sama <i>Sister City</i> Bandung dengan Mitra Fort Worth Dan Mitra Kawasaki	4.1. Tantangan Prosedur Birokrasi dalam implementasi <i>sister city</i> Kota Bandung 4.2. Tantangan Pendanaan dalam implementasi <i>sister city</i> Kota Bandung
BAB V Kesimpulan dan Saran	5.1 Kesimpulan 5.2 Saran